



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

---

Nomor : 1113/DJU/HM.02.3/10/2022 Jakarta, 18 Oktober 2022  
Lampiran : 3 Lembar  
Hal : Pelaksanaan Monitoring dan  
Evaluasi Register Elektronik

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi  
di  
tempat

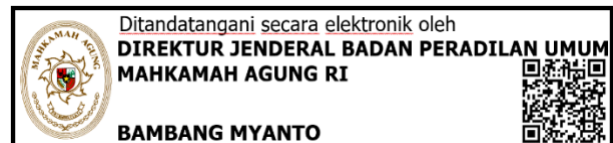
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1264/DJU/HM.02.3/12/2021 tentang Monitoring dan evaluasi Penerapan Register Elektronik yang **wajib** dilakukan oleh Pengadilan Tinggi **setiap bulan** terhadap Pengadilan Negeri yang sudah menerapkan register elektronik, maka sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2022 terdapat 15 (lima belas) Pengadilan Tinggi yang sudah mengirimkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 108 (seratus delapan) Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya masing-masing yang telah melaksanakan register elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kami sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada 15 (lima belas) Pengadilan Tinggi yang telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengadilan Negeri di wilayah Hukumnya, yaitu :

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;
4. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
5. Pengadilan Tinggi Bandung;
6. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
7. Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
8. Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
9. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
10. Pengadilan Tinggi Palu;
11. Pengadilan Tinggi Makassar;
12. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
13. Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
14. Pengadilan Tinggi Jayapura;
15. Pengadilan Tinggi Jambi.

Bersama dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi untuk terus mendorong Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya agar dapat mengusulkan penerapan register elektronik di satuan kerjanya, dan diingatkan kembali kepada Pengadilan Tinggi untuk **mengirimkan** hasil monitoring dan evaluasi penerapan register elektronik sesuai dengan format pada lampiran surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1264/DJU/HM.02.3/12/2021 (contoh format terlampir) serta dikirimkan melalui **email** [registerelektronik.badilum@gmail.com](mailto:registerelektronik.badilum@gmail.com).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Lampiran : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 1113/DJU/HM.02.3/10/2022

Tanggal : 18 Oktober 2022

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN REGISTER ELEKTRONIK PN ..... TAHUN 20..

PADA PENGADILAN TINGGI .....

No.	Unsur	Keterangan	Nilai EIS											
			Kelas IA Khusus dan Kelas IA					Kelas IB dan Kelas II						
			Nilai Maksimal	Tidak Maksimal *				Tindak Lanjut/ Penyelesaian	Nilai Maksimal	Tidak Maksimal *				Tindak Lanjut/ Penyelesaian
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III			Triwulan IV				
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	Rekapitulasi rasio penanganan perkara	80						100					
2	Rilis Versi SIPP	Versi SIPP yang terpasang di satuan kerja	30						25					
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	Kesesuaian kode satker pada nomor perkara sesuai dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014	30						25					
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	Waktu pelaksanaan delegasi masuk, maksimal 7 hari kerja	21						8					
5	Pendaftaran Perkara	Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam	25						30					
6	Pencatatan Barang Bukti	Kepatuhan pengguna dalam mengisi barang bukti suatu perkara	20						8					
7	Penetapan Hakim	Kepatuhan penetapan majelis/hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	25						28					
8	Penetapan Panitera Pengganti	Kepatuhan penetapan panitera pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	25						28					
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	Kepatuhan penetapan Jurusita dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	25						28					
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	Kepatuhan penetapan Hari Sidang Pertama dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	25						28					
11	Penginputan Tuntutan	Ketepatan waktu dalam input tuntutan dalam suatu perkara	25						30					
12	Penginputan Putusan Akhir	Ketepatan waktu dalam input putusan dalam suatu perkara	25						30					
13	Penginputan Minutasi	Kepatuhan penginputan minutasi maksimal 1x24 jam	25						30					
14	Minutasi Perkara	Ketepatan waktu dalam melakukan minutasi dalam waktu 7 hari	25						30					

No.	Unsur	Keterangan	Nilai EIS											
			Kelas IA Khusus dan Kelas IA					Kelas IB dan Kelas II						
			Nilai Maksimal	Tidak Maksimal *				Tindak Lanjut/ Penyelesaian	Nilai Maksimal	Tidak Maksimal *				Tindak Lanjut/ Penyelesaian
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
15	Penginputan Permohonan Banding	Kepatuhan waktu dalam input permohonan banding dalam waktu 1x24 jam	20						10					
16	Penginputan Permohonan Kasasi	Kepatuhan waktu dalam input permohonan kasasi dalam waktu 1x24 jam	12						8					
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	Kepatuhan waktu dalam input permohonan peninjauan kembali dalam waktu 1x24 jam	12						8					
18	Pengiriman Berkas Banding	Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 30 hari (Perdata) atau 14 hari (Pidana)	20						10					
19	Pengiriman Berkas Kasasi	Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas Kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 65 hari	12						8					
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah pemeriksaan persidangan (Pidana) atau 30 hari setelah jawaban/tanggapan atas alasan PK (Perdata)	12						8					
21	Pemberitahuan Putusan/ Penetapan	Kepatuhan waktu dalam input tanggal pemberitahuan putusan dalam waktu 1x24 jam	20						30					
22	Penginputan penetapan majelis/ hakim	Kepatuhan waktu dalam input penetapan majelis hakim/hakim dalam waktu 1x24 jam	25						28					
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	Kepatuhan waktu dalam input penunjukan panitera pengganti dalam waktu 1x24 jam	25						28					
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	Kepatuhan waktu dalam input penetapan hari sidang dalam waktu 1x24 jam	25						28					
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	Kepatuhan waktu dalam input penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam waktu 1x24 jam	25						28					
26	E-Document Dakwaan/Petitum	Kelengkapan Dokumen Elektronik dalam pendaftaran perkara (data umum)	20						20					
27	Pencatatan Saksi	Kelengkapan pencatatan data saksi	12						8					
28	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	Kepatuhan waktu dalam input Data Pelaksanaan Delegasi dalam waktu 1x24 jam	20						10					
29	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	Kepatuhan input penundaan jadwal sidang dalam waktu 1x24 jam	25						28					
30	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	Kepatuhan penginputan Perpanjangan Penahanan maksimal 1x24 jam sejak tanggal penetapan	25						25					
31	Unggah Putusan Akhir	Kepatuhan unggah dokumen putusan akhir maksimal 1x24 jam sejak tanggal putus	25						25					
32	E-Document Tuntutan	Kelengkapan Dokumen Elektronik tuntutan	20						20					

No.	Unsur	Keterangan	Nilai EIS											
			Kelas IA Khusus dan Kelas IA					Kelas IB dan Kelas II						
			Nilai Maksimal	Tidak Maksimal *				Tindak Lanjut/ Penyelesaian	Nilai Maksimal	Tidak Maksimal *				Tindak Lanjut/ Penyelesaian
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
33	E-Document Putusan Akhir / Penetapan	Kelengkapan Dokumen Elektronik Putusan	25						28					
34	Data Laporan Mediasi	Kesesuaian pencatatan tanggal laporan mediasi	20						10					
35	Data Diversi	Kesesuaian pencatatan tanggal laporan diversi	12						8					
36	Data Nilai Sengketa	Kesesuaian pencatatan Nilai Sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana	12						8					
37	Agenda Sidang Terakhir	Kesesuaian Agenda Sidang Terakhir dengan status perkara putus	25						28					
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	Kesesuaian Tanggal Sidang Terakhir dengan tanggal putusan	25						30					
39	Publikasi Pihak	Kesesuaian publikasi perkara sesuai SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011	25						30					
40	Pengisian BHT	Ada atau tidaknya pencatatan BHT pada suatu perkara	20						25					
41	Penahanan	Kesesuaian pencatatan penahanan habis sebelum perkara putus	25						25					
42	Sisa Biaya Perkara tk Pertama	Kesesuaian pencatatan pengembalian sisa panjar	25						25					
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25						25					

Keterangan :

\*) Rata - rata 3 bulan setiap unsur nilai EIS